



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SAMSOPHYAN
NIK : 7309010309710001
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Unit Kerja : DINAS PERIKANAN
Sub Unit Kerja : DINAS PERIKANAN
Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN
Jenis Laporan : Periodik - 2017
Tanggal Kirim : 30 Maret 2018

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

Lengkap

Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkn@kpk.go.id | <https://elhkn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
 (Tanggal Penyampaian/Jenjs Laporan - Tahun: 30 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN
SUB UNIT KERJA : DINAS PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAMSOPHYAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS PERIKANAN
3. NHK : 157395

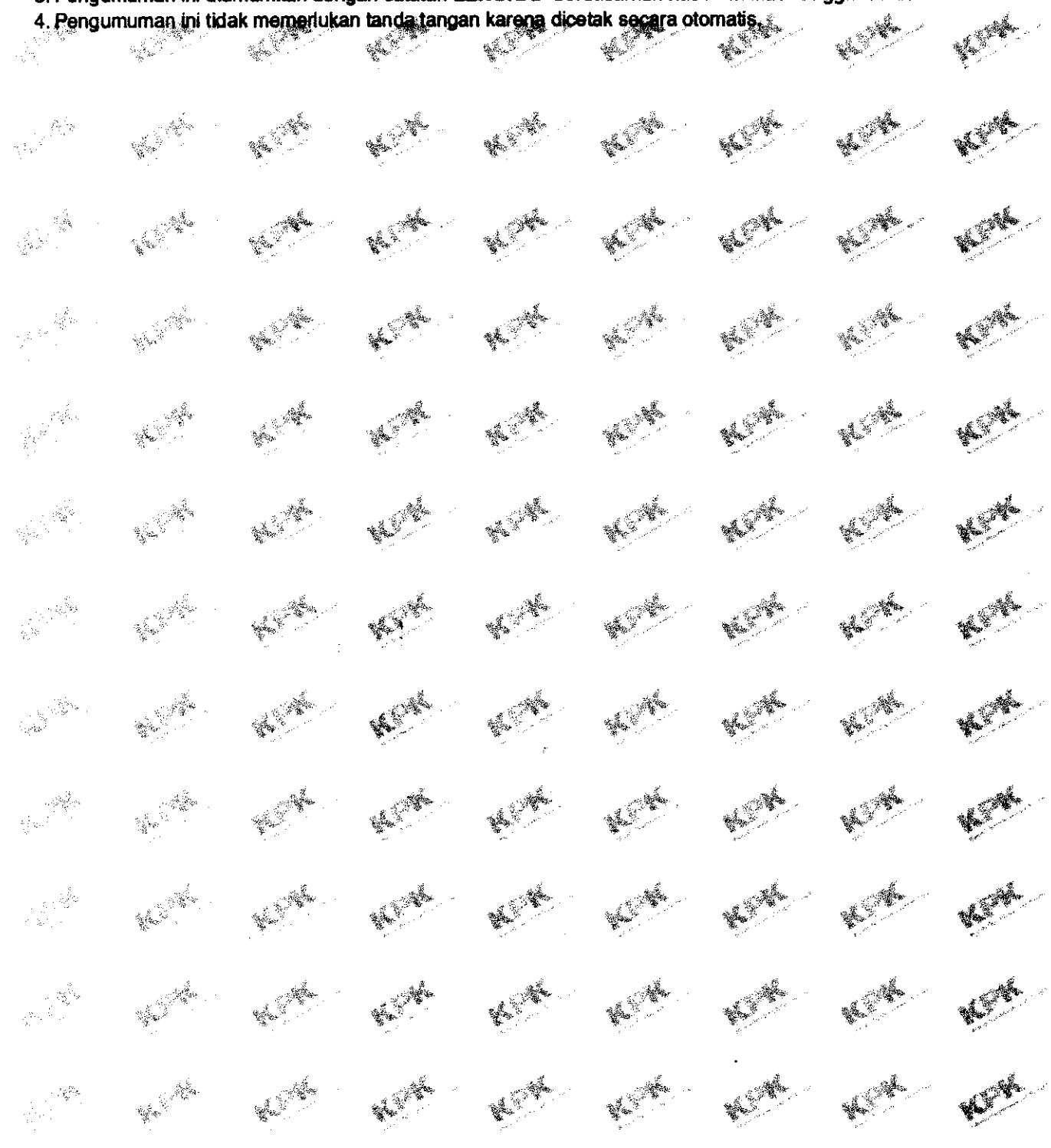
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	390.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m ² /90 m ² di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m ² /36 m ² di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	271.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOBIL, HONDA FREED MINI BUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 263.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.500.000
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.866.755
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—
Sub Total	Rp.	716.366.755
III. HUTANG	Rp.	228.560.666
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	487.806.089

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal 11 Oktober 2018.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : SAENAL
NIK : 7309141106700001
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Unit Kerja : BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Kerja : BIDANG PENGELOLA KEUANGAN
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLA KEUANGAN
Jenis Laporan : Periodik - 2017
Tanggal Kirim : 3 Mei 2018

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

- Lengkap
 Tidak Lengkap



**) Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

.....
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Mei 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
UNIT KERJA : BADAN KEUANGAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BIDANG PENGELOLA KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAENAL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLA KEUANGAN
3. NHK : 512381

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	370.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
2. Tanah Seluas 210 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	98.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AGYA AGYA 1.0GM/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA MX 135 55S (T135SEC) Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.500.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	395.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	480.895.000
III. HUTANG	Rp.	166.200.625
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	314.694.375

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : ANIRAH

Tempat/Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG / 18 Juli 1977

Nomor KTP/NIK : 7371075807770006

Alamat : JL. GATOT SUBROTO 3 NO. 10, UJUNG PANDANG BARU, TALLO, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam media pengumuman yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/ atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



14-February-2020
Pemberi Kuasa,

(ANIRAH)

*) Coret yang tidak perlu

Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama (sesuai dengan KTP) : ANDI BASO ARMAN
Tempat/Tanggal Lahir : MAROS / 24 Oktober 1976
Nomor KTP/NIK : 7371112410760009
Alamat : BTN KODAM VII BLOK A2 NO. 14, PAI, BIRINGKANAYYA, KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

- KHUSUS -

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

- Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pemberi Kuasa yang berada pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintahan yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan
- Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada:
 - Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;
 - Lembaga/pihak/profesi/instansi pemerintah yang terkait efek;
 - Badan usaha dan/atau perusahaan.

Sehubungan dengan itu, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun fotocopy) Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



13-February-2020
Pemberi Kuasa,

(ANDI BASO ARMAN)

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan

**) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

LAMPIRAN 3 - SURAT KUASA MENGUMUMKAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : FERY IRFAN SULI
Tempat/Tanggal Lahir : UJUNG PANDANG / 16 Juli 1968
Nomor KTP/NIK : 7309011607680004
Alamat : LINGK PADANG SESSERE NO. 25 , HASANUDDIN , MANDAI , MAROS , SULAWESI SELATAN

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa")

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"), beralamat di Jl. Kuningan Perada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam media pengumuman yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sethubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/ atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang maupun pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara terhitung sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampunan atau setelah mendapatkan persetujuan mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.



14-February-2020
Pemberi Kuasa.

*) Coret yang tidak perlu
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

(FERY IRFAN SULI)